

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

1. Definisi Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan bagi daerah yang menopang kekuatan keuangan daerah. Yang dimaksud dengan pendapatan asli daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah pendapatan daerah yang bersumber dari daerah yang bersangkutan, hasil pajak daerah, pajak daerah, hasil pengelolaan barang milik daerah orang pribadi, dan lain-lain yang terdiri dari pendapatan asli daerah yang sah.¹⁹

Menurut Halim dalam buku yang ditulis oleh Phaureula Artha Wulandari dan EmyIryanie, Pendapatan asli suatu daerah adalah pendapatan seluruh daerah yang berasal dari daerah tersebut dan dihasilkan sesuai dengan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perannya, sektor pendapatan daerah sangat penting karena mencerminkan kemampuan daerah untuk mendanai kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah.²⁰

¹⁹ Abid Muhtarom, "Analisis Pad (Pendapatan Asli Daerah) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Lamongan Periode Tahun 2010-2015", *Jurnal Ekonomi Bisnis Edisi Maret 2015*, Vol.13 No.1, hlm. 660

²⁰ Phaureula Artha Wulandari dan Emy Iryanie, *Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2018), hlm. 23.

Pasal 1 Ayat 18 UU 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang dihasilkan oleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD merupakan perwujudan dari prinsip desentralisasi dan sumber pendapatan bagi daerah. PAD memberdayakan pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah yang sesuai. Peranan pendapatan asli daerah sebagai sumber pendapatan menuntut pemerintah daerah untuk memaksimalkannya. Pasal 5 Ayat 1 UU 33/2004 mengatur berbagai sumber PAD, mulai dari pajak daerah dan biaya tambahan hingga pengelolaan kekayaan daerah perorangan dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah.²¹

Pemberlakuan Pendapatan Asli Daerah tidak lain karena adanya penerapan Desentralisasi fiskal pada suatu daerah. Desentralisasi secara umum diartikan sebagai penyerahan wewenang dan tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam hal penerimaan dan pengeluaran.²² Selain desentralisasi, daerah perlu kreatif dalam mengoptimalkan PAD untuk mendanai tugas desentralisasi. Namun, persoalannya adalah bagaimana mengoptimalkan PAD tanpa membebani perekonomian dengan pajak dan retribusi.²³

²¹Rizki Kurniasari, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening", *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Vol.10. No.3, Maret 2021, hlm 4

²²Pieter Noisirifan De Fretes, "Pengaruh Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah, Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten Kepulauan Yapen", hlm. 6

²³*Ibid.*, hlm.19

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pembiayaan pemerintahan daerah yang peranannya sangat tergantung kemampuan dan kemauan daerah dalam menggali potensi yang ada di daerah. UU No. 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah adalah sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan dan bertanggungjawab dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah serta besaran penyelenggaraandekonsentrasi dan tugas pembantuan.²⁴

Pendapatan Asli Daerah dapat dijelaskan oleh Sebuah teori federalis pajak yang menjelaskan bagaimana desentralisasi berhubungan dengan ekonomi, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat. Federalisme fiskal adalah struktur pemerintahan berlapis, masing-masing dengan sumber pendapatan dan tanggung jawab. Federalisme fiskal itu sendiri adalah seperangkat prinsip panduan yang diterapkan di suatu negara atau wilayah untuk membentuk keuangan pemerintah nasional. Istilah Federalisme Fiskal berarti Pemerintah Tingkat II (Kabupaten/Kota), yang merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah pusat. Dengan kata lain, itu berarti beberapa negara bagian di mana pemerintah negara bagian bukanlah entitas otonom. Teori Federalis Fiskal adalah teori yang berusaha membuat orang

²⁴ Abid Muhtarom, "Analisis PAD (Pendapatan Asli Daerah) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Lamongan Periode 2010-2015", hlm. 661

memahami bagaimana desentralisasi pemerintahan mempengaruhi situasi ekonomi, layanan yang diberikan kepada masyarakat, dan kesejahteraan rakyat.²⁵

2. Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah

Peningkatan pendapatan terjadi melalui pengembangan semua sumber pendanaan yang diterima dan dapat ditelusuri lebih lanjut jika potensinya sangat besar, dengan mempertimbangkan beberapa aspek. Hal ini dapat meningkatkan PAD dan diharapkan meningkat sesuai dengan yang diharapkan. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerataan Fiskal Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pasal 6 menyatakan bahwa sumber pendapatan daerah meliputi:

a. Pajak daerah

Ini adalah sumbangan yang diamanatkan secara hukum dari orang perseorangan atau badan hukum kepada masyarakat, tanpa imbalan langsung dan digunakan untuk kebutuhan masyarakat untuk kemakmuran rakyat.²⁶

Pajak daerah dibagi menjadi dua bagian meliputi:

- 1) Pajak Provinsi, meliputi:
 - a) Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air
 - b) Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air
 - c) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor

²⁵Fadli Ali Taslim dan Rheza Pratama, "Analisis Kinerja Keuangan,... hlm. 398-399

²⁶Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 51

- d) Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.
- 2) Pajak Kabupaten/Kota, meliputi:
- a) Pajak hotel
 - b) Pajak restoran
 - c) Pajak hiburan
 - d) Pajak reklame
 - e) Pajak pengambilan bahan galian golongan C
 - f) Pajak parkir²⁷
- b. Retribusi daerah

Retribusi adalah pajak yang dibayarkan atas layanan yang diberikan langsung kepada individu dan mencakup semua atau sebagian dari layanan yang diberikan atau biaya layanan untuk menerima layanan yang diberikan. Di sini, individu dan organisasi menerima layanan timbal balik langsung.

c. Hasil Pengolahan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Merupakan jenis pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan oleh ruang lingkup bagi hasil dari penyertaan modal pada badan usaha daerah atau BUMD dan dari penyertaan modal pada Badan usaha milik Negara (BUMN). Dan merupakan pembagian keuntungan dari penyertaan modal

²⁷Undang-undang Pajak Lengkap Tahun 2011, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2011), hlm. 383

dalam usaha milik badan usaha (BUMN) dan kelompok usaha masyarakat atau perusahaan swasta..

d. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Merupakan pendapatan yang dihasilkan dari seluruh pendapatan selain ketiga pendapatan daerah di atas. Ini termasuk penjualan barang milik daerah yang tidak dapat dipisahkan, pendapatan giro, pendapatan bunga deposito, tagihan ganti rugi dan retribusi daerah, rabat dan selisih kurs rupiah.²⁸

Pendapatan asli (PAD) suatu daerah yang tinggi tidak menjamin tingginya pendapatan masyarakat (pendapatan daerah) daerah tersebut. Namun, PAD yang tinggi dapat menjadi sumber daya yang sangat penting bagi pemerintah daerah dalam pembangunan masyarakat, termasuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Untuk memperoleh PAD perlu mengelola penggunaan dana yang dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kemakmuran daerah melalui program dan kegiatan yang dicanangkan oleh pemerintah daerah.²⁹

3. Kendala-Kendala dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Penyebab utama rendahnya pendapatan awal PAD dan tingginya ketergantungan pada pusat daerah adalah:

²⁸Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, hlm.51-52

²⁹ Abid Muhtarom, "Analisis PAD (Pendapatan Asli Daerah) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Lamongan Periode Tahun 2010-2015", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol.13 No.1,2015, hlm 661

- a. Kurangnya peran pengusaha lokal sebagai sumber pendapatan asli daerah
- b. Perpajakan yang sangat terpusat
- c. Pajak lokal sangat beragam, tetapi sedikit diandalkan sebagai sumber penghasilan
- d. Alasan politik mengapa banyak orang takut bahwa daerah yang didanai tinggi akan mendorong keruntuhan dan separatisme.
- e. Kelemahan dalam pemberian subsidi pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, melemahnya kemampuan pemerintah daerah dalam merencanakan pembangunan di daerah.³⁰

4. Langkah-Langkah Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Langkah-langkah efektifitas PAD dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan, memetabolisme, dan mengidentifikasi data APBN dan pelaksanaan PAD
- b. Hitung setiap tarif efektif PAD berdasarkan tahun anggaran.

Dengan rumus untuk mengetahuinya:

Rasio Efektivitas PAD: $\frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$

Target Penerimaan PAD

- c. Tetapkan nilai validitas PAD

³⁰Damas Dwi Anggoro, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Malang: UB Press, 2017), hlm.19-20

d. Menganalisis tingkat efektivitas PAD yang dihitung..³¹

B. Dana Perimbangan

1. Definisi Dana Perimbangan

Phaureula Artha Wulandari dan EmyIryanie dalam bukunya, menuliskan bahwa Perimbangan keuangan pemerintah dan pemerintah daerah adil, proporsional, demokratis, transparan, dan transparan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dengan mempertimbangkan beberapa pertimbangan, antara lain keadaan, kemungkinan dan kebutuhan daerah Sistem keuangan yang efisien. Dengan demikian, Anda dapat melihat tingkat pendanaan untuk pelaksanaan desentralisasi dan dukungan untuk daerah.³²

Menurut Nasution dalam penelitian yang dilakukan Masayu dan catur, dijelaskan bahwa *“Regional bottom aid is a source of revenue comes from the budget to support the implementation of local authorities in achieving the objective of granting regional autonomy which is primarily done by an increase better in services and public welfare”*. Dana transfer/subsidi pemerintah daerah merupakan sumber pendapatan dari anggaran untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah daerah untuk mencapai tujuan pemberian otonomi daerah,

³¹D Kartika, Ade Budi Stiawan dan Indra Cahya Kusuma, “Analisis Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas PAD, Dan Rasio Efisiensi PAD pada Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukabumi”, *Jurnal Sosial Humairoh*, Vol.7 No. 2, 2016

³² Phaureula Artha Wulandari dan Emy Iryanie, *Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah*, hlm. 10-11

terutama dengan meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.³³

Dana Perimbangan dapat dijelaskan oleh teori keagenan bahwa hubungan antara prinsipal dan agen bertindak atas nama umum, melayani kepentingan prinsipal, dan agen menerima imbalan tertentu atas tindakannya.³⁴ Masalah keagenan dapat muncul karena setiap individu diharapkan lebih memilih untuk memaksimalkan utilitas individu tersebut, yang kemungkinan akan berkonflik dengan kepentingan individu lainnya. Isu terkait keagenan ini menimbulkan asimetri informasi dan konflik kepentingan. Menurut karya Scott di Ardiansyah dan Widiyaningsih, asimetri informasi dapat dibagi menjadi dua bidang: seleksi yang merugikan dan *moral hazard*. Adverse selection merupakan salah satu jenis asimetri informasi, dimana ada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu transaksi bisnis yang memiliki manfaat informasi, tetapi pihak lain tidak memiliki manfaat informasi yang sama. *Moral hazard*, di sisi lain, adalah jenis asimetri informasi yang memungkinkan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi bisnis untuk secara langsung melihat kemajuan transaksi, sementara pihak lain tidak dapat melakukan hal yang sama.

Hubungan teori keagenan mengenai dana perimbangan dapat dilihat melalui hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah

³³ Masayu R.W dan Catur M.F, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Kota Bandung”, *Jurnal Kajian Akuntansi*, Vol.1 No.1, 2017, hlm. 66

³⁴ Nabiyatun Nur Fatimah, Dkk, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah”, *Jurnal Equity*, Vol.22 No.2, 2019, hlm. 199

daerah dalam penyaluran dana perimbangan, dan hubungan antara kewenangan DPRD (prinsipal) dan pemerintah daerah (agen). Pemerintah pusat melimpahkan kewenangan pengelolaan anggaran daerah kepada pemerintah daerah. Karena itu, akibat pendelegasian itu, pemerintah pusat mengurangi dana perimbangan. Tujuannya adalah untuk membantu pemerintah daerah mendanai kebutuhan sehari-hari mereka dan memberikan pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat mereka.³⁵

Keputusan No. 55 Tahun 2005 menyebutkan bahwa Dana Perataan didanai dari pendapatan APBN dan akan dialokasikan ke daerah untuk mendanai kebutuhan daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan desentralisasi. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa tanda terima transfer sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (b) adalah milik transfer pemerintah pusat yang terdiri dari dana perimbangan . Dana perimbangan dibagi meliputi Dana Distribusi Pendapatan (DBH), Dana Distribusi Umum (DAU), dan Dana Distribusi Khusus (DAK).³⁶

Dana Perimbangan merupakan salah satu bentuk transfer antar pemerintah. Dari segi ekonomi, alasan dilaksanakannya transfer pemerintah jika dilihat dari sisi ekonomi adalah:

³⁵Hastu Askoro dan Zulfikar, "Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia", *Jurnal Riset Akuntansi dan Kesuaguan Indonesia*, Vol.1 No.1, 2016. Hlm. 55

³⁶Rizki Kurniasari, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening", hlm 5

- a. Pemerintah pusat mengontrol pajak yang paling penting, yang menciptakan ketidakseimbangan keuangan vertikal. Akibatnya, sumber pajak yang dikuasai pemerintah daerah tidak mencukupi untuk mendanai berbagai pengeluaran.
- b. Ketidakseimbangan keuangan horizontal, yaitu perbedaan kemampuan dan kebutuhan keuangan antar daerah
- c. Terdapat *spillover effect*, yaitu eksternalitas ekonomi dan eksternalitas yang tidak menguntungkan dari satu aktivitas di satu area ke area lainnya.³⁷

2. Tujuan Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah berasal dari pendapatan daerah yang bersumber berdasarkan APBN buat mendukung wewenang pemerintah daerah dalam mencapai tujuan otonomi daerah, khususnya peningkatan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Secara umum, dana perimbangan adalah bagian terbesar berdasarkan pembiayaan aktivitas pemerintah daerah. Tujuan utama penyediaan dana perimbangan merupakan buat mengatasi kesenjangan fiskal antara pemerintah sentra dan pemerintah daerah, kesenjangan fiskal antara pemerintah daerah , memperbaiki sistem perpajakan, dan memperbaiki *inefisiensi* fiskal.³⁸

³⁷Pieter Noisirifan De Fretes, “Pengaruh Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah, Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten Kepulauan Yapen”, hlm.15-16

³⁸Masayu R.W dan Catur M.F, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Kota Bandung”, hlm. 64

Capkova dan Roncakova berpendapat bahwa mekanisme utama perimbangan antar pemerintah adalah relokasi dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Berbagai skema transfer tanpa syarat (umum) digunakan untuk menangani ketidakseimbangan vertikal. Transfer bersyarat (khusus) dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah ditujukan untuk mendanai layanan tertentu seperti pendidikan dasar, kesejahteraan sosial dan jalan. Relokasi dana Perimbangan digunakan untuk mengatasi ketimpangan horizontal antar pemerintah daerah.

Kemandirian keuangan pemerintah daerah berbanding terbalik dengan tingginya porsi pendapatan transfer dalam menutupi belanja pemerintah. Belanja daerah sangat dipengaruhi oleh relokasi pemerintah pusat. Kompensasi moneter dari dana transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah merupakan insentif bagi pemerintah daerah untuk mendanai belanja daerah.³⁹

3. Sumber-Sumber Dana Perimbangan

Berikut merupakan sumber dari Dana Perimbangan meliputi:

a. Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan salah satu sumber pendapatan bagi daerah dan juga merupakan penyertaan modal pemerintah daerah untuk menerima dana pembangunan dari pemerintah pusat dan menutup biaya daerah. Tujuan pembangunan dan kegiatan ekonomi daerah dalam rangka desentralisasi dapat

³⁹*Ibid.*, hlm. 66

dicapai melalui alokasi belanja daerah, dimana pendapatan dari belanja tersebut diterima oleh DBH dan dianggarkan serta dialokasikan dalam proporsi yang sesuai.⁴⁰

Dana bagi hasil berasal dari pajak, cukai, dan sumber daya alam. Pajak di sini terdiri dari Pajak Bumi Bangunan (PBB), pajak penghasilan berdasarkan Pasal 15 dan 29 Pajak Penghasilan, dan Pasal 21 Wajib Pajak Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan.

b. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum adalah dana yang dialokasikan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dan digunakan untuk mendanai kebutuhan daerah sebagai bagian dari pelaksanaan desentralisasi. Rasio DAU antar daerah ditentukan dengan memperhatikan hal-hal yang dilimpahkan kepada provinsi dan kabupaten. maupun kabupaten/kota.⁴¹

Dana Alokasi Umum adalah sumber daya dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan untuk mendanai kebutuhan daerah yang terkait dengan pelaksanaan desentralisasi. Menurut APBN, besaran seluruh DAU ditetapkan minimal 26 persen dari pendapatan bersih dalam negeri. DAU daerah dialokasikan berdasarkan kesenjangan keuangan dan alokasi dasar. Kesenjangan keuangan berarti

⁴⁰ Nabiyatun Nur Fatimah.DKK, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah", *Jurnal Equity*, Vol.22 No.2, 2020, hlm. 202

⁴¹ Rizki Kurniasari, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening", hlm. 5

pengurangan kebutuhan keuangan karena kemampuan keuangan daerah.⁴²

c. Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus disediakan oleh APBN, yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kegiatan khusus berupa pekerjaan pemerintah, digunakan untuk pembangunan rumah sakit, pendidikan, jalan, pasar, irigasi, dll. Dan air bersih. DAK ini dianggap setara dengan belanja pembangunan karena bertujuan untuk mendanai peningkatan pelayanan publik.⁴³

C. Pengeluaran Perkapita

1. Definisi Pengeluaran Perkapita

Muhamad Abdul Halim dalam bukunya, Pengeluaran per kapita didefinisikan sebagai jumlah total anggota rumah tangga yang termasuk dalam suatu rumah tangga, dengan menggunakan konsep konsumsi rumah tangga.⁴⁴ Menurut Badan Pusat Statistik sendiri, pengeluaran per kapita adalah biaya yang ditanggung oleh rumah tangga selama periode tertentu. Oleh karena itu, hasil akhir dari pengeluaran per kapita ini adalah pengeluaran rumah tangga untuk pembelian barang dan jasa serta kebutuhan sehari-hari anggota rumah tangga selama periode waktu tertentu.

⁴² Rahmi Aminus, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir", *Jurnal Ekonomi Global Masa Kini Mandiri*, Vol. 9 No.1, 2018, hlm. 50

⁴³ Rizki Kurniasari, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening", hlm 5

⁴⁴ Muhamad Abdul Halim, *Teori Ekonomika Edisi 1*, (Tangerang: Jelajah Nusa, 2012), hlm. 47.

Pengeluaran per kapita digunakan untuk mengukur standar hidup manusia. Hal ini dipengaruhi oleh pengetahuan yang ada dan kesempatan untuk merealisasikannya melalui berbagai kegiatan produksi dan menghasilkannya sebagai pendapatan berupa barang dan jasa. Beban atau konsumsi timbul dari pendapatan yang ada. Pengeluaran per kapita menggambarkan tingkat paritas daya beli masyarakat (PPP).⁴⁵

2. Konsumsi Rumah Tangga Perkapita

Konsumsi atau lebih khusus lagi pengeluaran rumah tangga per kapita, adalah pengeluaran rumah tangga untuk barang dan jasa akhir.⁴⁶

Sukirno menemukan bahwa konsumsi rumah tangga adalah jumlah pengeluaran yang dikeluarkan rumah tangga untuk membeli segala macam kebutuhan sehari-hari pada tahun tertentu.⁴⁷

Konsumsi rumah tangga terbagi atas konsumsi makanan dan konsumsi bukan makanan, tanpa memperhatikan tempat asal barang, baik yang dibeli, buatan sendiri atau dibeli, dan terbatas pada konsumsi rumah tangga tidak untuk konsumsi/pengeluaran usaha atau persediaan kepada pihak lain.⁴⁸

⁴⁵ Riyan Muda. DKK, "Pengaruh Angka Harapan Hidup, Tingkat Pendidikan dan Pengeluaran Perkapita terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sulawesi Utara pada Tahun 2003-2017", *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Vol.19 no. 01, 2019, hlm. 48

⁴⁶ Suherman Rosyidi, *Pengantar Teori Ekonomi, Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikro & Makro* (Jakarta: Rajawali, 2012), hlm. 163.

⁴⁷ Sadono Sukirno, *Makroekonomi Teori Pengantar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 38

⁴⁸ Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, *Pengeluaran dan Konsumsi Rumah Tangga Provinsi Banten 2016*, (Banten: Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, 2016), hlm. 9.

3. Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Pengeluaran Perkapita

Tentunya dalam hal ini banyak faktor yang mempengaruhi belanja konsumen rumah tangga, seperti faktor ekonomi, faktor demografi, dan faktor non ekonomi. Faktor ekonomi yang mempengaruhi konsumsi rumah tangga adalah pendapatan rumah tangga, kekayaan rumah tangga, jumlah daya tahan konsumen dalam masyarakat, suku bunga, dan proyeksi ke depan. Lalu untuk faktor demografi yang mempengaruhi hal ini adalah tingkat konsumsi yang terdiri dari jumlah penduduk dan komposisi penduduk. Sedangkan untuk faktor non ekonominya dapat dilihat dari faktor sosial budaya masyarakat.⁴⁹

Faktor ekonomi yang telah disebutkan diatas terdiri dari:

a. Pendapatan rumah tangga

Pendapatan yang dimaksud adalah pendapatan disposabel. Pendapatan ini memiliki dampak yang besar pada tingkat konsumsi. Semakin tinggi pendapatan Anda, semakin banyak yang Anda konsumsi. Ketika tingkat pendapatan meningkat, kemampuan rumah tangga untuk membeli barang-barang konsumsi meningkat.

b. Aset rumah tangga.

Aset rumah tangga yang dimaksud adalah aset riil (rumah, tanah, mobil) dan aset finansial. Kekayaan ini meningkatkan

⁴⁹ Najmi Illahi, "Analisis Determinan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Indonesia", *Jurnal Ecogen*, Vol.1 No.3, 2018, hlm. 549

pendapatan yang dapat dibelanjakan sehingga Anda dapat meningkatkan konsumsi

c. Suku bunga

Suku bunga yang tinggi dapat mengurangi konsumsi pribadi. Semakin tinggi tingkat bunga, semakin tinggi biaya konsumsi ekonomi

d. Ramalan untuk masa depan

Ketika rumah tangga membuat prediksi yang lebih baik tentang masa depan mereka, mereka akan memiliki lebih banyak kebebasan untuk mengkonsumsi. Karena konsumsi pribadi cenderung meningkat dan sebaliknya.

Faktor kedua yang mempengaruhi konsumsi adalah faktor demografi, yang terdiri dari faktor-faktor berikut:

a. Jumlah penduduk

Dengan jumlah penduduk yang besar, rata-rata pengeluaran pribadi atau keluarga relatif rendah, tetapi konsumsi pribadi secara keseluruhan meningkat.

b. Komposisi Penduduk

Komposisi penduduk suatu negara dapat dinilai dari berbagai klasifikasi seperti umur, pendidikan, dan tempat

tinggal. beberapa klasifikasi diantaranya: usia, pendidikan, dan wilayah tinggal.⁵⁰

Faktor ketiga yang mempengaruhi konsumsi rumah tangga adalah faktor non ekonomi. Jika faktor ini merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi konsumsi yang ditimbulkan oleh faktor sosial budaya masyarakat.

Faktor-faktor tersebut merupakan salah satu implementasi dari teori konsumsi Keynes, yang menyatakan bahwa tingkat pengeluaran konsumen hanya didasarkan pada tingkat pendapatan masyarakat.⁵¹ Menurut Keynes, perhitungan perubahan angka ekonomi suatu negara dapat didasarkan pada besar kecilnya konsumsi rumah tangga dan pendapatan rumah tangga. Dalam konsumsi rumah tangga, selalu ada pengeluaran konsumsi meskipun tidak ada pendapatan, dan fenomena ini disebut pengeluaran konsumsi otonom.

Dalam studinya, Keynes membandingkan tingkat pendapatan dan konsumsi pribadi tertentu dengan tren konsumsi. Jika seseorang memiliki kecenderungan untuk mengkonsumsi yang tinggi, pendapatannya dihabiskan untuk konsumsi, dan jika seseorang memiliki kecenderungan untuk mengkonsumsi yang rendah, sebagian kecil dari pendapatan orang tersebut dihabiskan untuk konsumsi.⁵²

⁵⁰ Ekawarna & Fachruddiansyah, *Pengantar Teori Ekonomi Makro*, (Jakarta: Gaung Persada, 2010), hlm. 158

⁵¹ *Ibid.*, hlm.160

⁵² Sadono Sukirno, *Makroekonomi Teori Pengantar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 86

4. Pola Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita

Pendapatan nasional merupakan faktor utama yang mempengaruhi pengeluaran per kapita. Hubungan antara keduanya adalah positif, yang berarti bahwa ketika pendapatan meningkat, demikian pula pengeluaran untuk konsumsi publik.⁵³ Hubungan antara keduanya dapat dirumuskan:

$$C = a + bY$$

Dimana:

C = Pentingnya konsumsi pribadi oleh rumah tangga individu dalam perekonomian

a = Konsumsi yang tidak dipengaruhi oleh pendapatan nasional

b = Pendapatan meningkat dan perbandingan meningkat

Y = pendapatan disposabel (pendapatan konsumsi).⁵⁴

Perilaku konsumen individu atau rumah tangga pada dasarnya terbagi menjadi dua yaitu konsumsi makanan dan konsumsi non makanan. Tingkat kepentingan masyarakat ditentukan dengan menggunakan pendapatan yang diterima untuk memenuhi kebutuhan pangan dan non pangan. Semakin tinggi persentase pendapatan yang digunakan untuk pembelian, maka semakin rendah tingkat dukungan kesejahteraan masyarakat dan sebaliknya semakin rendah pendapatan yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

⁵³ Zaini Ibrahim, *Pengantar Ekonomi Makro*, (Banten: Koperasi Syariah Baraka, 2016), hlm. 42.

⁵⁴ Nursiah Chalid, "Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Daerah Riau", *Jurnal Ekonomi*, Vol.18 No.1, 2010, hlm. 30-31

Konsumen menghabiskan sebagian besar pendapatan mereka untuk konsumsi karena pendapatan mereka yang rendah. Dalam beberapa kasus, konsumsi lebih besar daripada pendapatan. Pendapatan rendah dan proporsi pengeluaran makanan yang tinggi. Semakin tinggi pendapatan, semakin rendah persentase dan semakin tinggi konsumsi pribadi produk lain.⁵⁵

D. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

1. Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia merupakan perluasan dari pilihan manusia. Pada prinsipnya, keputusan manusia pasti banyak dan sewaktu-waktu bisa berubah. Tetapi pada semua tingkat perkembangan, ada tiga pilihan dasar. Artinya, pendidikan untuk mengakses sumber daya yang dibutuhkan untuk umur panjang dan sehat serta kehidupan yang layak. Tentu saja, pembangunan manusia tidak sebatas itu, tetapi kreatif dan produktif, termasuk kebebasan politik, ekonomi dan sosial, dan banyak tambahan untuk menikmati martabat pribadi dan menjamin hak asasi manusia.⁵⁶

2. Definisi Indeks Pembangunan Manusia

Badan Pusat Statistik menyebutkan bahwa Pembangunan Manusia didefinisikan merupakan proses perluasan pilihan bagi penduduk (enlarging people choice). Indeks Pembangunan Manusia menggambarkan bagaimana penduduk memiliki akses ke hasil

⁵⁵*Ibid.*, hlm. 35

⁵⁶ Badan Pusat Statistik, *Indek Pembangunan Manusia Metode Baru 2014*, (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2015), hlm. 8

pembangunan, termasuk pendapatan, kesehatan dan pendidikan. IPM diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990 dan perhitungannya direvisi pada tahun 2010. Menurut BPS sendiri, metode penghitungan IPM baru berubah pada 2014, namun metode perencanaan berubah sejak 2010.⁵⁷

UNDP (United Nations Development Program) menyatakan bahwa Indeks Pembangunan Manusia merupakan ukuran pencapaian pembangunan manusia di berbagai komponen kualitas hidup. IPM menggunakan pendekatan tiga dimensi: umur panjang dan kesehatan, ilmu pengetahuan dan kehidupan yang layak.⁵⁸ Nilai IPM suatu negara atau wilayah tidak hanya dipengaruhi oleh tinggi rendahnya pendapatan per kapita, tetapi juga oleh beberapa faktor di dalam negara atau wilayah tersebut yang berkaitan dengan aspek pembangunan manusia. Kebijakan untuk mendukung pembangunan manusia dapat dilihat dari porsi APBN yang ditujukan untuk pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan. Besarnya anggaran pemerintah yang dialokasikan untuk kedua sektor tersebut dapat mencerminkan arah pemerintah dalam mengembangkan aspek pembangunan manusia.⁵⁹

Untuk memastikan bahwa tujuan pembangunan manusia tercapai, kita perlu mempertimbangkan empat aspek kunci dari paradigma

Indeks Pembangunan Manusia:

⁵⁷ Badan Pusat Statistik Jawa Timur, *Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2020*, hlm. 2

⁵⁸ Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyanti, *Ekonomi Pembangunan Syariah Edisi Revisi Cetakan Pertama*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016), hlm 102

⁵⁹ Lincoln Arsyad, *Ekonomi Pembangunan*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2010), hlm.48

a. Produktifitas

Penduduk harus meningkatkan produktifitas dan partisipasi penuh dalam proses penciptaan pendapatan dan nafkah. Sehingga pembangunan ekonomi merupakan bagian dari model pembangunan manusia.

b. Pemerataan

Penduduk memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan akses terhadap sumber daya ekonomi dan sosial. Semua hambatan yang memperkecil kesempatan untuk memperoleh akses tersebut harus dihapus, sehingga mereka dapat mengambil manfaat dari kesempatan yang ada dan berpartisipasi dalam kegiatan produktif yang dapat meningkatkan kualitas hidup.

c. Kestinambungan

Akses terhadap sumber daya ekonomi dan sosial harus dipastikan tidak hanya untuk generasi-generasi yang akan datang. Semua sumber daya fisik, manusia, dan lingkungan selalu diperbaharui.

d. Pemberdayaan

Penduduk harus berpartisipasi penuh dalam keputusan dan proses yang akan menentukan (bentuk/arah) kehidupan mereka

serta untuk berpartisipasi dan mengambil keputusan dalam proses pembangunan.⁶⁰

Ada enam alasan mengapa kerangka berpikir pembangunan manusia penting, yaitu:

- a. Tujuan akhir pembangunan merupakan buat mempertinggi harkat martabat manusia
- b. Menjalankan misi pengentasan kemiskina
- c. Mendorong peningkatan produktivitas maksimum dan mempertinggi kontrol atas barang dan jasa
- d. Menjaga kelestarian alam (lingkungan) & menjaga ekuilibrium ekosistem
- e. Memperkuat basis warga sipil & institusi politik buat membuatkan demokrasi
- f. Menjaga stabilitas sosial politik yang aman bagi aplikasi pembangunan.⁶¹

3. Manfaat Indeks Pembangunan Manusia

IPM merupakan salah satu indikator kunci untuk melihat sisi lain dari pembangunan. Keuntungan utama dari HDI adalah:

⁶⁰Pieter Noisirifan De Fretes, “Pengaruh Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah, Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten Kepulauan Yapen”, hlm. 10-11

⁶¹Irvana Arofah dan Siti Rohimah, “Analisis Jalur Untuk Pengaruh Angka Harapan Hidup, Harapan Lama Sekolah, Rata-Rata Lama Sekolah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Melalui Pengeluaran Riil Per Kapita Di Provinsi Nusa Tenggara”, hlm. 79

- a. Indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam membangun kualitas hidup masyarakat (masyarakat/penduduk).
- b. Menentukan peringkat regional/negara atau status pembangunan
- c. Dalam kasus Indonesia, IPM merupakan data strategis karena tidak hanya menjadi tolak ukur kinerja pemerintah, tetapi juga sebagai salah satu pengalokasi untuk penetapan Dana Alokasi Umum (DAU).

IPM adalah tingkat pembangunan manusia di daerah yang menjadi tolak ukur dasar perencanaan untuk:

- a. Antar waktu, Jeda untuk memeriksa kemajuan setelah jangka waktu tertentu
- b. Antar Daerah, untuk memberikan gambaran kemajuan daerah dibandingkan dengan daerah lain.⁶²

4. Pengukuran Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia Kompleks merupakan alat ukur yang dapat digunakan untuk memeriksa kinerja pembangunan manusia di suatu wilayah setiap saat. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan alat ukur yang dapat menunjukkan tingkat pencapaian pembangunan manusia dengan mempertimbangkan tiga faktor yaitu kelangsungan hidup, pengetahuan, dan daya beli.

⁶² Badan Pusat Statistik Kabupaten Humbang Hasundutan, *Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Humbang Hasundutan 2018*, (Humbang Hasundutan: BPS Kabupaten Humbang Hasundutan, 2019), hlm. 10-11

$IPM = 1/3$ (indeks harapan hidup) + $1/3$ (indeks pendidikan) + $1/3$ (indeks daya beli).⁶³

Capaian Pembangunan Manusia pada suatu daerah dikelompokkan menjadi empat kelompok meliputi:

- a. Kelompok “sangat tinggi”: $IPM \geq 80$
- b. Kelompok “tinggi”: $70 \leq IPM < 80$
- c. Kelompok “sedang”: $60 \leq IPM < 70$
- d. Kelompok “rendah”: $IPM < 60$.⁶⁴

5. Indikator Indeks Pembangunan Manusia

Indikator Indeks Pembangunan telah diterbitkan setiap tahun dalam Laporan Pembangunan Manusia sejak tahun 1996. Dalam laporan Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Report*) terdiri dari:

- a. Indeks Kesehatan

Indikator khas dari Indeks Pembangunan Manusia adalah harapan hidup saat lahir. Angka Harapan Hidup (AHH) digunakan sebagai salah satu indikator untuk mengukur derajat kesehatan masyarakat. Harapan Hidup (AHH) adalah perkiraan usia rata-rata yang akan dicapai suatu populasi dalam jangka waktu tertentu. Semakin baik situasi ekonomi dan perawatan

⁶³Beik Syauqi Irfan, *Ekonomi Pembangunan Syariah*. (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada), 2016, hlm. 147

⁶⁴Badan Pusat Statistik, *Indek Pembangunan Manusia 2015*, (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2016), hlm. 127

medis suatu negara, semakin panjang harapan hidup orang-orang di negara itu.⁶⁵

Angka harapan hidup dihitung dengan menggunakan pendekatan tidak langsung (*indirect estimasi*). Dua jenis data digunakan untuk menghitung harapan hidup. Yakni, Anak Lahir Hidup (ALH) dan Anak Masih Hidup (AMH). Sedangkan untuk perhitungan umur harapan hidup digunakan nilai hidup maksimum berdasarkan standar UNDP, dan nilai maksimum sebagai batas perhitungan adalah 85 tahun dan nilai minimum adalah 25 tahun (standar UNDP). Harapan hidup bisa lebih lama jika Anda berada dalam kondisi kesehatan, gizi, dan lingkungan yang baik.⁶⁶

b. Indeks Pendidikan

Literasi dan rata-rata lama pendidikan sekolah merupakan indikator utama kualitas bakat dan keberhasilan perkembangan di lapangan. Angka melek huruf (AMH) adalah rasio penduduk yang melek huruf di atas usia 15 tahun dengan penduduk di atas usia 15 tahun. Tingkat melek huruf maksimum adalah 100 dan minimum adalah 0 (standar UNDP). Ini mewakili keadaan 100%, atau keadaan di mana setiap orang dapat membaca dan menulis. Nilai 0 mencerminkan situasi yang berlawanan..⁶⁷

⁶⁵Beik Syauqi Irfan, *Ekonomi Pembangunan Syariah*, hlm.147

⁶⁶Badan Pusat Statistik, *Indeks Pembangunan Manusia Sulawesi Barat*. 2015

⁶⁷Badan Pusat Statistik, *Indikator Pembangunan Manusia Kabupaten Polewali Mandar*.2015, hlm. 48

Rata-rata pendidikan sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan penduduk berusia di atas 25 tahun untuk pendidikan formal. Rata-rata lama pendidikan sekolah dihitung dengan menggunakan batasan UNDP sampai dengan 15 tahun dan minimal 0 tahun. Lama pendidikan sekolah yang diharapkan adalah rata-rata jumlah tahun barang dagangan yang akan dirasakan oleh seorang anak berusia 7 tahun. Indikator ini digunakan untuk mengetahui pencapaian pendidikan pada jenjang yang berbeda dan diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Batasan yang digunakan adalah maksimal 18 tahun dan minimal 0 tahun.⁶⁸

c. Indeks Standar Hidup Layak

Contoh lain bahan acuan untuk mengukur kualitas hidup manusia adalah standar hidup yang layak. Dalam arti luas, standar hidup yang layak merupakan tingkat kesejahteraan penduduk sebagai akibat dari peningkatan ekonomi. UNDP menggunakan produk domestik bruto riil yang disesuaikan (PDRB) untuk mengukur standar hidup yang sesuai, dan BPS menggunakan pengeluaran rata-rata yang disesuaikan untuk menghitung standar hidup yang sesuai..⁶⁹

⁶⁸ Latif Arafat.Dkk, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Kalimantan Tengah, *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan*, Vol.7 No.2, 2018, hlm. 143

⁶⁹Yuni Nurkuntari. DKK, “Analisis Jalur Terhadap Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia”, *Value Added Majalah Ekonomi Dan Bisnis*, Vol.12 No.2, 2016, hlm. 102

Daya beli masyarakat terhadap seperangkat kebutuhan pokok diturunkan dari konsumsi rata-rata per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang merepresentasikan kinerja pembangunan untuk kehidupan yang layak. Tingkat kesejahteraan dikatakan meningkat seiring dengan meningkatnya konsumsi per kapita riil. Artinya, kenaikan nominal pengeluaran rumah tangga lebih tinggi dari tingkat inflasi pada periode yang sama.⁷⁰

Namun, ada beberapa faktor lain yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia. Kesempatan kerja ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi lokal, infrastruktur, dan kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, jika ketiga hal tersebut juga ditingkatkan maka indeks pembangunan manusia daerah akan meningkat, dan semakin tinggi indeks pembangunan manusia maka semakin tinggi pula tingkat keberhasilan pembangunan ekonomi di daerah tersebut.⁷¹

Beberapa di antaranya adalah dari adanya pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang ada. Pembangunan ekonomi di sini merupakan upaya struktural yang ditujukan pada produktivitas dan penciptaan lapangan kerja, yang pada akhirnya akan meningkatkan

⁷⁰ Nyoman Lilya Santika Dewi dan I Ketut Sutrisna, “Pengaruh Komponen Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali”, *Jurnal Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, Vol.3 No.3, 2014, hlm. 110

⁷¹Irvana Arofah dan Siti Rohimah, “Analisis Jalur Untuk Pengaruh Angka Harapan Hidup, Harapan Lama Sekolah,...”, Vol.2 No.1, 2019, hlm. 77

pendapatan penduduk.⁷² Sejahtera adalah keinginan semua orang dalam hidup, dan Kesejahteraan tercapai ketika seseorang dapat memenuhi kebutuhan utama hidup. Ada banyak cara untuk menjadi kaya, salah satunya adalah bekerja. Jumlah dan distribusi pendapatan, pendapatan yang terkait dengan hasil pekerjaannya, bisnis dan faktor keuangan lainnya. Tentu saja, ketika orang bekerja, mereka memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, tetapi ini menyeimbangkan ketersediaan pekerjaan dan sehingga dapat meningkatkan kesempatan kerja di masyarakat, saya harus mengambilnya.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi di suatu wilayah berarti jumlah barang dan jasa yang ditawarkan oleh pelaku ekonomi semakin meningkat di semua sektor perekonomian. Oleh karena itu, peningkatan produksi yang dihasilkan oleh sektor-sektor perekonomian tersebut membuka kesempatan kerja yang lebih luas dan pada akhirnya perekonomian. Menurunkan tingkat pengangguran terbuka dengan harapan peningkatan pelayanan publik yang lebih baik.⁷³

Kemudian, peningkatan kualitas pembangunan manusia tidak terlepas dari pembangunan infrastruktur yang ada. Peningkatan kualitas talent tergantung pada ketersediaan infrastruktur yang

⁷² Dwi Mahroji, "Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Pengangguran,... Vol. 9 No. 1, 2019. hlm. 52

⁷³ Nabelah Farrasy Jannaty, "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Kesempatan Kerja terhadap,... Vol.1 No.2,2018, hlm. 231

mendukung upaya peningkatan kualitas talent. Infrastruktur adalah fasilitas fisik yang dirancang untuk mendukung pembangunan ekonomi negara. Infrastruktur dapat meningkatkan investasi swasta dan publik serta mempercepat pembangunan. Hal ini tentu berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan menunjukkan betapa adilnya pembangunan itu berlangsung. Infrastruktur seperti jalan, air bersih, listrik, serta fasilitas pendidikan dan kesehatan seperti gedung sekolah dan rumah sakit berdampak signifikan terhadap kualitas sumber daya manusia.⁷⁴

Perbedaan tingkat pendapatan masyarakat, kondisi geografis wilayah dan sosial menjadikan tingkat pendapatan bukan lagi ukuran utama untuk menghitung pembangunan, tetapi keberhasilan pembangunan manusia terletak pada kreativitas, hal ini tidak terlepas dari capaian pemerintah yang berperan. Mencapai keadilan sosial. Belanja pemerintah juga dapat dijadikan sebagai cerminan kebijakan pemerintah di daerah. Pengeluaran pemerintah digunakan untuk mendanai sektor publik utama yang membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, prioritas pemerintah untuk mencapai pengembangan talenta berkualitas terkait dengan apa yang tercermin dalam HDI adalah berinvestasi di bidang pendidikan dan

⁷⁴Klementius Primus Interparis Bria Kali, *Penngaruh Infrastruktur terhadap Pembangunan Manusia di, ...* hlm. 4

mengucapkan selamat. Hal ini diharapkan berdampak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.⁷⁵

E. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Pengeluaran Perkapita terhadap Tingkat Indeks Pembangunan Manusia

1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Tingkat Indeks Pembangunan Manusia

Menurut Halim dalam buku yang ditulis oleh Phaureula Artha Wulandari dan EmyIryanie, Dalam perannya, sektor pendapatan asli daerah sangat penting karena mencerminkan kemampuan daerah untuk mendanai kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah.⁷⁶

Korelasi Pendapatan Asli Daerah dan Indeks Pembangunan Manusia tercermin pada asas Desentralisasi yang dijelaskan dalam teori Federalisme Fiskal, dimana teori ini menyebutkan bagaimana desentralisasi berhubungan dengan ekonomi, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat.⁷⁷ Selajen dengan teori tersebut, penelitian Fadli dan Rheza, yang menyebutkan bahwa besar kecilnya pengaruh Efektivitas Pendapatan Asli Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia didasarkan pada penerapan desentralisasi fiskal suatu daerah agar daerah tersebut menjadi lebih baik, pemerintahan daerah dituntut

⁷⁵Lilis Saryani dan Abdelina, “Analisis Faktor Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Padangsidempuan”, *Jurnal Education and Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan*, Vol.8 No.2, 2020, hlm. 508-509

⁷⁶ Phaureula Artha Wulandari dan Emy Iryanie, *Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2018), hlm. 23.

⁷⁷ Fadli Ali Taslim dan Rheza Pratama, “Analisis Kinerja Keuangan Daerah... hlm. 398

untuk dapat memberikan pelayanan publik yang lebih baik dengan menggali potensi penerimaan secara mandiri dalam membangun dan mengembangkan perekonomian pemerintahan daerah.⁷⁸

Penelitian lain yang dilakukan oleh Arisa dan Dewi menyebutkan bahwa korelasi positif Pendapatan Asli Daerah dan Indeks Pembangunan Manusia sejalan dengan pemikiran bahwa semakin besar pemerintah daerah mampu menggali sumber-sumber keuangan lokal melalui PAD maka akan sebanding dengan laju pembangunan di daerah tersebut.⁷⁹

2. Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Tingkat Indeks Pembangunan Manusia

Korelasi Dana Perimbangan dan Indeks pembangunan Manusia tercermin pada teori keagenan bahwa hubungan antara prinsipal dan agen bertindak atas nama umum, melayani kepentingan prinsipal, dan agen menerima imbalan tertentu atas tindakannya.⁸⁰ Dengan kata lain dapat dilihat melalui hubungan antara pemerintah pusat (prinsipal) dan pemerintah daerah (agen) dalam penyaluran dana perimbangan, dan hubungan antara kewenangan DPRD (prinsipal) dan pemerintah daerah (agen).⁸¹ Kemudian dalam penelitian yang dilakukan oleh Masayu dan Catur menyebutkan mekanisme utama perimbangan antar

⁷⁸ *Ibid.*, 535

⁷⁹ Arisa Arispen dan Dewi Rahmi, “Pengaruh Dana Otonomi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Aceh Tahun 2008-2020”, *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi*, Vol 1 No.1, 2021 hlm. 79

⁸⁰ Nabiyatun Nur Fatimah, Dkk, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah”, *Jurnal Equity*, Vol.22 No.2, 2019, hlm. 199

⁸¹ Hastu Askoro dan Zulfikar, “Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan... hlm.55

pemerintah adalah relokasi dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Berbagai skema transfer tanpa syarat (umum) digunakan untuk menangani ketidakseimbangan vertikal. Transfer bersyarat (khusus) dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah ditujukan untuk mendanai layanan tertentu seperti pendidikan dasar, kesejahteraan sosial dan jalan. Transfer Perimbangan digunakan juga untuk mengatasi ketimpangan horizontal antar pemerintah daerah.⁸² Sejalan dengan teori, penelitian yang dilakukan Pande dan Made menyatakan bahwa Dana Perimbangan dan Indeks Pembangunan Manusia saling berkaitan, semakin tingginya dana perimbangan semakin tinggi alokasi dana untuk belanja modal dalam peningkatan pembangunan prasarana publik yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.⁸³

3. Pengaruh Pengeluaran Perkapita terhadap Tingkat Indeks Pembangunan Manusia

Implementasi Pengeluaran Perkapita dan Indeks Pembangunan Manusia tercermin dalam studi yang dilakukan Keynes, yang menyatakan bahwa tingkat pengeluaran konsumen hanya didasarkan pada tingkat pendapatan masyarakat.⁸⁴ Jika seseorang memiliki kecenderungan untuk mengkonsumsi yang tinggi, pendapatannya dihabiskan untuk konsumsi, dan jika seseorang memiliki

⁸² Masayu R.W dan Catur M.F dalam Capkova dan Roncakova, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana... hlm.66

⁸³ Pande Putu dan Made Heny, “Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Karangasem Provinsi Bali”, *e-Jurnal Unud*, Vol.7 No.10, 2017, hlm. 2184

⁸⁴ Ekawarna & Fachruddiansyah, *Pengantar Teori Ekonomi Makro*, ... hlm.158

kecenderungan untuk mengkonsumsi yang rendah, sebagian kecil dari pendapatan orang tersebut dihabiskan untuk konsumsi.⁸⁵ Teori ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nyoman Lilya dan I Ketut yang menyatakan bahwa ketika kemampuan daya beli masyarakat akan mendorong permintaan barang dan jasa meningkat, sehingga hal tersebut dapat pula memicu pertumbuhan ekonomi terkait konsumsi serta kemampuan daya beli masyarakat tersebut berdampak pada kesejahteraan masyarakatnya terkait pemenuhan kebutuhan.⁸⁶

F. Penelitian Terdahulu

Pada penelitian ini, penulis mencantumkan penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti lain untuk pengembangan materi yang akan dilakukan oleh penulis. Beberapa Penelitian yang relevan telah dilakukan oleh banyak peneliti diantaranya:

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
1	Apriansyah Permana, dkk, Pengaruh Pengeluaran Perkapita terhadap Indeks	Hasil penelitian menemukan bahwa variabel pengeluaran per kapita berpengaruh positif signifikan terhadap	Penelitian Apriansyah dkk, ini hanya berfokus pada variabel Pengeluaran Perkapita.

⁸⁵ Sadono Sukirno, *Makroekonomi Teori Pengantar*,... hlm.86

⁸⁶ Nyoman Lilya S.D dan I Ketut.S, "Pengaruh Komponen Indeks Pembangunan Manusia terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali", E-Jurnal EP UNUD, Vol.3 No.3, 2014, hlm. 112

	Pembangunan Manusia di Provinsi Banten Periode 2012-2016.	variabel Indeks Pembangunan Manusia. ⁸⁷	Selain itu tahun dilakukan penelitian pun berbeda dimana penelitian ini diambil pada periode 2012-2016 dan objek penelitian berada pada provinsi yang berbeda.
2	Siska Damayanti, Analisis Pengaruh Pengeluaran Penduduk, Pengeluaran Pemerintah Provinsi, Dan Rasio Ketergantungan Pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Di Indonesia.	Ditemukan bahwa peningkatan rata-rata pengeluaran bulanan per orang memiliki dampak positif yang signifikan terhadap IPM. Hal ini karena pengeluaran pemerintah negara bagian untuk sektor kesehatan itu sendiri memiliki dampak positif yang signifikan terhadap IPM, sedangkan pengeluaran pemerintah untuk pendidikan tidak. Dengan kata lain, peningkatan belanja pendidikan itu sendiri adalah HDI. Selain itu, hasil survei yang menggunakan variabel rasio dependen	Penelitian ini Siska Damayanti, berfokus pada variabel Pengeluaran Perkapita yang datanya diperoleh dari rata-rata pengeluaran bulanan per orang. Selain itu Variabel bebas Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan tidak diuji dalam penelitian ini.

⁸⁷ Apriansyah Permana, dkk, "Pengaruh Pengeluaran Per Kapita Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Banten Periode 2012-2016", *Jurnal Tazkiya*, Vol. 20.No.1, 2019

		regional berpengaruh besar terhadap IPM. ⁸⁸	
3	Gede Ferdi Williantara dan I Gusti Ayu Nyoman Budiasih, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Dana Bagi Hasil Pada Indeks Pembangunan Manusia.	Penelitian ini memberikan hasil bahwa pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana bagi hasil tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Perlu diketahui bahwa kemampuan PAD, DAU, dan DBH untuk mendanai belanja modal tidak mempengaruhi pencapaian IPM. Di sisi lain, dana alokasi khusus berdampak negatif terhadap IPM. Oleh karena itu, semakin besar DAK dalam pembiayaan belanja modal, semakin rendah manfaat IPM. ⁸⁹	Variabel Dana Perimbangan dan Pengeluaran Perkapita tidak ada dalam Penelitian Gede dan I Gusti.
4	Adel Rivaldo, Dkk, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan	Variabel pendapatan asli daerah terbukti tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia, variabel Dana Alokasi Umum berpengaruh positif signifikan terhadap Indeks Pembangunan	Penelitian Adel dkk, berfokus pada Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan disini dijabarkan melalui Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus,

⁸⁸ Siska Damayanti, "Analisis Pengaruh Pengeluaran Penduduk, Pengeluaran Pemerintah Provinsi, Dan Rasio Ketergantungan Pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Di Indonesia", *Jurnal Universitas Islam Indonesia*, 2018

⁸⁹Gede Ferdi Williantara dan I Gusti Ayu Nyoman Budiasih, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Dana Bagi Hasil Pada Indeks Pembangunan Manusia", *E-Jurnal Akutansi*, Vol.16. No.3, 2016

	Belanja Modal sebagai Variabel Intervening	Manusia. Variabel Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia Ternyata ada pengaruhnya. Indeks memiliki indeks, dan variabel pendapatan asli daerah tidak mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia. Variabel Belanja Modal, Dana Alokasi Umum Tidak Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Melalui investasi, variabel dana alokasi khusus berpengaruh positif signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia investasi. ⁹⁰	sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan keseluruhan dari Dana Perimbangan. Selain itu Variabel Pengeluaran Perkapita tidak diteliti pada penelitian ini.
5	Anim Rahmayati dan Imanda Firmantyas Putri Pertiwi, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.	Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah hanya dipengaruhi oleh pendapatan asli daerah. Dana Perimbangan yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan, belum berdampak pada Indeks	Varibel Pengeluaran Perkapita tidak diteliti pada penelitian Anim dan Imanda. Penelitian ini berfokus pada Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan dengan

⁹⁰Adel Rivaldo.Dkk, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening”, *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, Vol.1 No.1,2019

		Pembangunan Manusia di Jawa Tengah. ⁹¹	objek yang diteliti pada provinsi Jawa Tengah
6	Martin Tamaro Siburian, dkk, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2011-2018.	PAD berdampak positif terhadap IPM karena salah satu komponen pembangunan manusia adalah pendapatan. Lalu lintas DBH sendiri berdampak negatif terhadap IPM, dan DAU tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM. Sebaliknya, porsi DAK dan pemerintah daerah berdampak positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia itu sendiri. ⁹²	Varibel Pengeluaran Perkapita tidak diteliti pada penelitian Martin dkk. Penelitian ini berfokus pada Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan dengan objek yang diteliti pada provinsi Kalimantan Tengah dengan periode waktu yang digunakan juga berbeda.
7	Tina Miniawati Barusman, dkk, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia Pada Pemerintah Daerah Di	PAD dan belanja modal berpengaruh positif signifikan terhadap IPM, maka dapat ditunjukkan bahwa peningkatan PAD dan belanja modal juga akan meningkatkan IPM itu sendiri. ⁹³	Fokus yang sama pada penelitian ini adalah variabel Pendapatan Asli Daerah saja. Sedangkan Varibel Dana Perimbangan dan Pengeluaran Perkapita tidak diteliti. Tahun Periode penelitian

⁹¹Anim Rahmayati dan Imanda Firmantyas Putri Pertiwi, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Indeks Pembangunan Manusia", *Journal of Islamic Finance and Accounting*, Vol.1 No.1, 2018

⁹²Martin Tamaro Siburian, dkk, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2011-2018", *Jurnal Tirtayasa Ekonometrika*, Vol.16 No.1, 2021

⁹³Tina Miniawati Barusman, dkk, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia Pada Pemerintah Daerah Di Provinsi Lampung Periode 2013-2015", *Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bandar Lampung*, Vol. 74 No. 27, 2016

	Provinsi Lampung Periode 2013-2015.		pada penelitian Tina dkk yaitu pada 2013- 2015
8	Eka Marisca Harliyani dan Haryadi, Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jambi.	Hasil yang diperoleh adalah dua variabel penelitian yang mempengaruhi IPM. Kedua variabel tersebut adalah hubungan antara derajat desentralisasi keuangan publik dan kecukupan belanja langsung. Dalam hal ini, ketiga variabel ketergantungan keuangan daerah: rasio, efektivitas PAD, dan efisiensi PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM. Intinya adalah bahwa hubungan antara desentralisasi fiskal dan kecukupan pengeluaran berdampak langsung pada IPM Jambi dari tahun 2001 hingga 2014. ⁹⁴	Penelitian Eka dan Haryadi berfokus pada bagaimana efisiensi dan Efektifitas Pendapatan Asli Daerah terhadap IPM di Provinsi Jambi. Selain variabel Dana Perimbangan dan Pengeluaran Perkapita tidak ada dalam penelitian ini, objek yang dituju juga berbeda.
9	Febita Agustin Nurhalimah Dkk, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Indeks	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun pendapatan asli daerah memiliki pengaruh langsung, dana perimbangan tidak berpengaruh langsung terhadap Indeks Pembangunan Manusia,	Penelitian ini berfokus pada Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan saja. Sedangkan Variabel Pengeluaran Perkapita tidak dijelaskan pada penelitian ini.

⁹⁴ Eka Marisca Harliyani dan Haryadi, "Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jambi", *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*, Vol.3 No.3, 2016.

	Pembangunan Manusia Melalui Belanja Modal di Kota Surabaya.	sedangkan pendapatan asli daerah dan dana perimbangan berpengaruh tidak langsung terhadap Indeks Pembangunan Manusia melalui belanja modal. ⁹⁵	
10	A. Jauhar Mahya dan Widiowati, Pengaruh Angka Harapan Lama Sekolah, Rata-Rata Lama Sekolah, Dan Pengeluaran Per Kapita Terhadap Indeks Pembangunan Manusia.	Berdasarkan hasil simulasi numerik, lama pendidikan sekolah yang diharapkan, rata-rata lama pendidikan sekolah, dan pengeluaran per kapita diketahui memiliki dampak yang signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.. ⁹⁶	Penelitian ini berfokus pada Variabel ketiga yaitu Variabel Pengeluaran Perkapita. Sedangkan variabel lain tidak dijelaskan dalam penelitian ini.
11	Sri Rahmadhani dan Cahyo Utomo, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi dan Dana Bantuan Pemerintah Terhadap Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia.	Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pendapatan awal daerah dan dana alokasi secara simultan berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Hasil penelitian ini sejalan dengan hipotesis penelitian. Hasil uji hipotesis secara parsial menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah dan	Variabel Dana Perimbangan dan Pengeluaran Perkapita tidak dicantumkan pada penelitian Sri Rhmadhani dan Cahyo. Melainkan penelitian ini berfokus pada Pendapatan Asli Daerah.

⁹⁵ Febita Agustin Nurhalimah.DKK, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Melalui Belanja Modal di Kota Surabaya", *Jurnal Ekobistek*, Vol. 10 No.2, 2021.

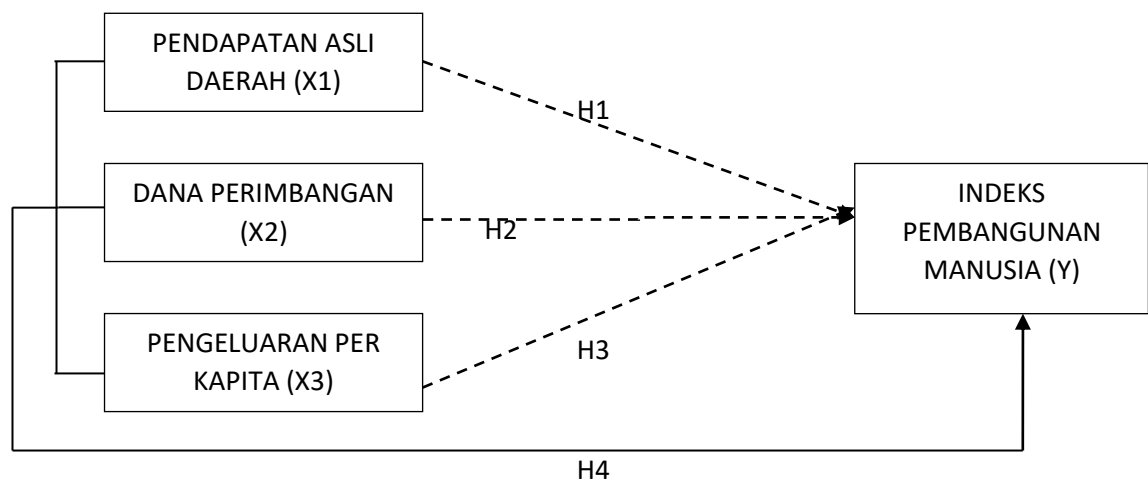
⁹⁶ A. Jauhar Mahya dan Widowati, "Pengaruh Angka Harapan Lama Sekolah,Rata-Rata Lama Sekolah, Dan Pengeluaran Per Kapita Terhadap Indeks Pembangunan Manusia", *Jurnal Pendidikan dan Riset Matematika*, Vol.3 No.2, 2021.

		dana alokasi berpengaruh signifikan terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. ⁹⁷	
--	--	--	--

G. Kerangka Konseptual

Penelitian ini memiliki Kerangka Konseptual sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual



Keterangan:

-----: Berpengaruh secara Parsial

—————: Berpengaruh secara Simultan

⁹⁷ Sri Ramadhani dan Cahyo Utomo, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi dan Dana Bantuan Pemerintah Terhadap Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia", *Jurnal Ilmiah Solusi*, Vol.17 No.1, 2019.

H. Hipotesis Penelitian

H₁: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh Signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia

H₂: Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia

H₃: Pengeluaran Perkapita berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia

H₄: Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Pengeluaran Perkapita berpengaruh signifikan dan simultan terhadap Indeks Pembangunan Manusia